

## Pemkot Anggarkan Rp20 M untuk MBG



*Sumber gambar: Kaltim Post      Selasa, 04/02/2025*

**BONTANG** – Kepala Disdikbud Bambang Cipto Mulyono mengatakan, hingga kini belum tahu alokasi anggaran itu diperuntukkan apa. Apalagi sampai saat ini juga belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Anggaran ini untuk apa kami pelajari dulu. Tunggu petunjuk teknis,” kata Bambang.

Bahkan bentuk MBG ini seluruh kabupaten atau kota di Kaltim yang belum uji coba juga bertanya-tanya. Terkait dengan arahan maupun durasi pelaksanaannya. “Termasuk uji cobanya kapan kami juga belum tahu,” ucapnya.

Akan tetapi nominal yang dimasukkan TAPD<sup>i</sup> Bontang itu tidaklah cukup untuk membiayai program MBG selama satu tahun. Bahkan Bambang menyebut angka tersebut hanya habis untuk sebagai cadangan operasional pendamping atau apa kami belum tahu,” tutur dia.

Ia juga belum mengetahui terkait penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Bontang. Nantinya untuk MBG akan menjadi tupoksi SPPG. Mulai dari pengolahan hingga distribusi. Bekerja sama dengan tim gizi, TNI, dan Polri.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah menganggarkan untuk program tersebut. Tepatnya di APBD 2025 ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Amiruddin Syam. “Sudah kami anggarkan untuk MBG nilainya sekira Rp20 miliar,” kata Amiruddin.

Akan tetapi, Pemkot belum mendapatkan petunjuk teknis dari pelaksanaan program itu hingga kini. Terkait nominal anggaran tersebut dititipkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). “Kami anggarkan semampu kami. Siapa tau mungkin untuk operasional, pendampingan, atau uji coba,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Sony Suwito menjelaskan, nominal itu dihitung berdasarkan angka untuk satu porsi makan gratis yakni Rp10 ribu dikalikan jumlah sasaran. Tetapi angka itu bisa berubah jika memang kebutuhan anggaran membeludak daripada nominal yang telah dipatok.

“Bisa itu dilakukan pergeseran anggaran. Karena ini program dari pemerintah pusat. Tentunya daerah harus mengikuti,” pungkas Sony. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemkot Anggarkan Rp20 M untuk MBG, 04/02/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>i</sup> Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.